

**KINERJA TENAGA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA
DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI****(Studi Di Desa Koto Jayo Dan Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh)**¹Muhammad Fajri Adriansah, ²Ika Sartika, ³Andi Ony^{1,2,3}Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia²Corresponding Author: fajriadriansah92@gmail.com**ABSTRACT**

The task of village assistants in assisting village development has not run optimally. If this happens continuously, it will affect the village development process as mandated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research method used in order to review, develop and test the truth to find a scientific knowledge. The methods that can be used are very diverse, of course the method to be chosen must be appropriate and closely related to the procedures, tools and research design that will be carried out by the researcher. While the research method is basically a scientific way to obtain data with certain purposes and uses. There are four keywords that need to be considered, namely, scientific method, data, purpose and usability. The scientific method means research activities based on scientific characteristics, namely rational, empirical, and systematic. Rational means that research activities are carried out in ways that make sense, so that they are affordable by human reasoning. Empirical means that the methods used can be observed by humans, so that other people can observe and know the methods used. Systematic means that the process used in the research uses certain logistical steps. The results showed that Tanah Grow District was measured by how the innovation model was applied, the innovation process and the benefits of innovation there was no initiative from village assistants because of the limited authority in implementing assistance in villages as regulated in the Regulation of the Minister of Villages PDPT Number 19 of 2020 concerning Guidelines General Village Community Assistance. The conclusions that can be drawn from the results of the discussion and research are as follows: Village assistants in village development in Koto Jayo Village, Tanah Grow District, Bungo Regency, Jambi Province, can guarantee that village performance has not met all indicators, only a few indicators, quality of work (Quality of Work) Work) villages that are assessed to meet the indicators, because every month village assistance must submit individual reports.

Keywords: performance, village assistant & village development.

INTRODUCTION

Asas otonomi tersebut diberikan pada dua wilayah yaitu pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang dasar tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain kebijakan peraturan perundang undangan khusus untuk mensukseskan otonomi Desa, pemerintah melalui kebijakan manajemen organisasi pemerintahan membentuk satu kementerian yang secara khusus mensukseskan penyelenggaraan otonomi Desa yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi atau yang biasa disingkat Kemendes, PDPT.

Selain kebijakan di atas, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara menyebutkan bahwa pemerintah desa mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pemerintah Daerah melalui

peraturan Bupati menetapkan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dengan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan anggaran yang ada pada pemerintah desa sebelum adanya kebijakan tersebut.

Dengan adanya sumber anggaran desa dari APBN dan APBD tentu adanya peningkatan anggaran pemerintah desa yang semula tidak adanya anggaran pemerintah desa yang bersumber dari APBN. Kebijakan keuangan tersebut memberikan harapan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membiayai kebutuhan desa yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Selain kebijakan keuangan tersebut, Kementerian Desa PDTT dalam strategi mensukseskan penyelenggaraan otonomi desa yang dinilai paradigma baru pada pemerintahan desa juga mengeluarkan kebijakan dengan membentuk satuan kerja atau pendamping Desa dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pendamping Desa. Dalam peraturan tersebut pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. dalam bahasa kerennya *Sustainable Development Goals* disingkat SDGs.

Pembangunan desa memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Salah satu Poin Pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk kemandirian sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, dan mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378).

Pemberian Dana Desa (DD) kepada setiap desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa yang merupakan salah satu tugas pendamping desa agar terealisasi dengan baik dan sesuai perencanaan pembangunan yang telah di sepakati bersama. Kenyataannya kegiatan pembangunan desa belum mampu terealisasi keseluruhan.

Berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak terhadap makin besarnya dana yang diterima di masing-masing desa. Di satu sisi, upaya ini memberikan dampak yang positif, tetapi tidak jarang pula membuat urusan desa menjadi lebih kompleks dan rumit. Untuk itulah dibutuhkan peran dari pendamping desa yang berkompotensi untuk memberikan bantuan pemikiran atau solusi saat desa menghadapi suatu masalah. Contohnya, tidak terealisasi pembangunan desa secara keseluruhan karena terhambat suatu permasalahan tertentu sehingga banyak desa yang memiliki status masih desa tertinggal.

Pendamping Desa Kecamatan Tanah Tumbuh bahwa tahun 2021, menyampaikan keluhannya, bahwa tidak adanya Tenaga Pendamping Desa Lokal desa di karenakan pengunduran diri serta belum di penuhiya permintaan untuk perekrutan pengganti dan kurangnya sinergi antar pendamping desa dan perangkat desa. Tidak hanya itu untuk konektivitas antar desa saja sangat sulit dijangkau karena akses jalan yang belum memadai dan membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama. Seperti Pedamping Desa dan Pendamping Lokal Desa lainnya yang ada di Kabupaten Bungo, yang belum berpengalaman dalam kegiatan pendampingan serta kurangnya kesadaran untuk mengikuti pembekalan teknis yang menunjang peningkatan kinerja sebagai tenaga Pendamping Desa. Jadi sebagian besar belajar dari literatur yang yang menjadi dasar tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan desa.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa tugas Pendamping Desa dalam pendampingan pembangunan desa belum berjalan dengan optimal. Apabila hal ini terjadi secara menerus, maka akan mempengaruhi proses perkembangan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu juga terdapat juga informasi mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten sebagaimana dari berita Gatra.com memberitakan bahwa "Dari 141 dusun yang ada, kategori maju ada 24 dusun, kategori mandiri ada 3 dusun, kategori dusun berkembang ada 84 dusun dan sisanya 30 dusun masih tertinggal," ungkap Kepala DPMD Kabupaten Bungo Taufik Hidayat,". Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dari Indeks Desa Membangun (IDM) melibatkan dari berbagai pihak, baik pihak pemerintahan desa maupun pedamping desa yang di nilai kinerjanya tidak seperti yang diharapkan dan belum bekerja dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menilai penting untuk melakukan penelitian terkait kinerja Pendamping Desa dalam pendampingan di Desa Koto Jayo memiliki status desa tertinggal dan nanti di perbandingkan dengan Desa Tanah Tumbuh yang memiliki status desa berkembang terhadap penyelenggaraan Pembangunan Desa karena kinerja pendamping desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa terutama dalam hal mewujudkan pembangunan desa sehingga tidak ada desa yang dikategorikan dengan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal.

Menurut Stoner dalam (Uha 2013 : 213) kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan presepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russel dalam (Uha 2013 : 213) mendefenisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Hendoko dalam (Uha 2013 : 213) kinerja sebagai proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson (Uha 2013: 213) bahwa kinerj seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Keberhasilan instansi pemerintah (organisasi publik), kinerja diukur dengan cara membandingkan misi dan tujuan dengan pencapaiannya.

Sedangkan Steers & Mowday sebagaimana dikutip oleh Jackofsky (1984) mengemukakan bahwa kinerja merupakan hal yang sangat relevan untuk dibahas karena (1) keseluruhan efektivitas organisasi tergantung daripadanya dan (2) individu itu sendiri, dalam hal agar dipekerjakan, dipertahankan dalam pekerjaannya, dan berbagai imbalan yang akan diterima terkait dengan kinerjanya (Christine, 2010:123).

Membahas kinerja tentu tidak terlepas dari pencapaian hasil yang telah dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prawirosentono (1992:2) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Sedangkan Menurut Mitchell (1987:491) dalam proses peningkatan kinerja aparatur terdapat 5 (lima) aspek untuk mengukur kinerja tersebut, yaitu : 1) Kualitas Kerja (*Quality of Work*), 2) Ketepatan (*Promptness*), 3) Prakarsa (*Initiative*), 4) Kemampuan (*Capability*), 5) Komunikasi (*Communication*).

Lebih lanjut Effendi (2005:3) mengatakan bahwa terjadinya komunikasi adalah: “Sebagai konsekuensi hubungan sosial (*social relation*), karena manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling berhubungan, karena berhubungan menimbulkan interaksi sosial (*social interaction*). “Dengan terjalannya komunikasi yang baik akan tercipta pula kesamaan persepsi tentang suatu kebijakan, Liliweri (2007:277) berpendapat, “Komunikasi merupakan interaksi antara komunikator dengan komunikan yang mempertukarkan dan memberi makna yang sama atas informasi untuk suatu tujuan tertentu melalui media, metode, teknik atau cara-cara yang telah ditetapkan”.

Terbangunnya jalinan komunikasi yang baik, dalam pengertian jelas dan transparan akan membentuk timbulnya kesamaan persepsi. Dalam hubungan itu, Liliweri (2007:278) menyatakan bahwa, “Metode yang paling tepat dalam melakukan komunikasi adalah yang bersifat informatif dan membujuk”. Metode ini dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, dialogis atau secara tidak langsung melalui media.

Dari berbagai teori kinerja yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dalam penelitian ini peneliti menilai yang relevan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kinerja menurut Mitchell, untuk mengukur kinerja aparatur dapat dilihat dari *Quality of Work* (Kualitas Kerja), *Promptness* (Ketepatan), *Initiative* (Prakarsa), *Capability* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi). Peneliti menilai dari kelima indikator tersebut ada dalam pelaksanaan kerja pendamping desa dalam pendampingan pembangunan Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh.

METHODS

Metode penelitian digunakan dalam rangka mengulas, mengembangkan dan menguji kebenaran untuk menemukan suatu pengetahuan secara ilmiah. Metode yang akan dapat digunakan sangat beragam, tentunya metode yang akan dipilih harus sesuai dan berhubungan erat dengan prosedur, alat dan desain penelitian yang akan dilakukan peneliti. Sedangkan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, Sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Sedangkan penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data temuan lapangan serta menyajikan secara deskriptif. Data yang disajikan bukan hanya sekedar data terlihat dan terucap, akan tetapi merupakan data yang mengandung makna yang holistik dibalik data yang terlihat dan terucap. Penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh

dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-ruguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus menyusun suatu desain penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan Anol Bhattacerje (2012: 8) dalam bukunya, yaitu: *research design is a comprehensive plan or data collection in an empirical research project. It is "blueprint" for empirical research aimed at answering specific research questions or testing specific hypotheses, and must specify at least three processes: 1) The data collection process; 2) The instrument development process; 3) The sampling process.*

Selanjutnya menurut Arikunto (2006:51), bahwa: desain (*design*) penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan desain ini dilakukan setelah kita menetapkan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, situasi dan kondisi dari lokasi dimana penelitian ini dilakukan.

Hal ini dijelaskan oleh Calderon & Gonzales (1993:45) berpendapat bahwa: *descriptive research describes and interprets what is. It is concerned with conditions of relationship that exist; practices that prevail; beliefs; processes that are going on; effects that are being felt, or trends that are developing. The process of descriptive research goes beyond mere gathering and tabulation of data. It involves the elements or interpretation of the meaning or significance of what is described. Thus description is often combined classifications, interpretation and evaluation.*

Penelitian deskriptif menjelaskan dan menafsirkan apa yang ada. Hal ini berkaitan dengan kondisi hubungan yang ada; praktik yang berlaku; keyakinan; proses yang terjadi; efek yang dirasakan, atau tren yang berkembang. Proses penelitian deskriptif melampaui sekedar pengumpulan dan tabulasi data. Ini melibatkan unsur-unsur atau interpretasi arti atau makna dari apa yang dijelaskan. Dengan demikian deskripsi sering dikombinasikan dengan perbandingan dan kontras yang melibatkan pengukuran, klasifikasi, interpretasi dan evaluasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hennink, Hutter dan Bailey (2010:31) berpendapat bahwa: *qualitative research is a broad umbrella term that covers a wide range of techniques and philosophies, thus it is not easy to define. In broad terms qualitative research is an approach that allows you to examine people's experiences in detail, by using a specific set of research methods such as in depth interview, focus group discussions, observation content analysis, visual methods, and life histories or biographies.*

Penelitian kualitatif adalah payung yang luas yang mencakup berbagai teknik dan filosofi, sehingga tidak mudah untuk menentukan. Dalam arti luas penelitian kualitatif adalah pendekatan yang memungkinkan anda untuk memeriksa pengalaman masyarakat dalam detail, dengan menggunakan satu set tertentu dari metode penelitian seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok, terfokus, observasi, analisis isi, metode visual, dan sejarah hidup atau biografi.

Selanjutnya Denzin dan Lincoln (dalam Hennink Dkk 2010:32) menyatakan bahwa: *qualitative research involves an interpretative, naturalistic approach to the world. This means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them.*

Penelitian kualitatif melibatkan penafsiran, pendekatan naturalistik kepada dunia. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam pengaturan alam mereka, mencoba untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dalam hal makna orang membawa kepada mereka.

Selain itu penelitian kualitatif, Sugiyono menyatakan (2010:9) bahwa: metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang menjajaki atau menggali sesuatu masalah secara mendalam dan komprehensif dari kumpulan informasi dengan membaca kejadian atau fenomena disekitarnya untuk membantu menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif relevan digunakan untuk dapat menjawab rumusan permasalahan penelitian terkait Kinerja Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo.

RESULT AND DISCUSSION

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi suatu organisasi dan individu, karena hasil penilaian ini dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi maupun individu tersebut dalam pencapaian misinya. Untuk individu maupun organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik, informasi mengenai kinerja sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh individu/organisasi itu telah sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilakukan secara sistematis dan lebih terarah.

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis data hasil penelitian lapangan, data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh kunci baik pejabat maupun masyarakat di tempat peneliti melakukan penelitian, laporan serta buku-buku yang mendukung penelitian ini. Semua data akan diolah dengan metode kualitatif deskriptif. Sistematika penulisannya berdasarkan pada indikator-indikator pengukuran kinerja dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menciptakan strategi peningkatan kinerja pendamping desa dalam pembangunan desa.

Untuk melihat gambaran kinerja pendamping desa dalam pembangunan desa di Desa Koto Jayo dan Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, maka akan diuraikan gambaran kinerja menurut Mitchell (1987:491). Menurut Mitchell, untuk mengukur kinerja aparatur dapat dilihat dari *Quality of Work* (Kualitas Kerja), *Promptness* (Ketepatan), *Inisiatif* (Prakarsa), *Capability* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi). Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Quality of Work (Kualitas Kerja)

Kualitas kerja seorang pegawai dapat dilihat dari tingkat disiplin pegawai tersebut. Perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan disiplin di lingkungan pemerintah, dalam hal ini khususnya pendamping desa dan aparatur pemerintah desa.

Pendamping desa memiliki kedudukan dalam pemerintahan desa dan mempunyai kewenangan dari Kementerian. Sehingga mengharuskan seorang pendamping desa untuk menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pendamping Desa pada pasal 10 B yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Dalam menjalankan perannya mendampingi pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa diwajibkan setiap bulannya menyampaikan laporan individual, formulir kunjungan lapangan serta lembar waktu kerja individual kepada Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai pendamping desa, serta masukan bagi satker P3MD Provinsi Jambi terkait perkembangan pendampingan desa, kebutuhan pembinaan penguatan internal, serta kebutuhan koordinasi dan dukungan kebijakan bagi pelaksanaan program. Sejalan dengan penuturan dari Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PM) Kabupaten Bungo, Bapak Aljonheri pada tanggal 7 Januari 2022 menuturkan:

Iya, setiap bulannya para pendamping lokal desa dan pendamping desa wajib menyampaikan laporan individual, formulir kunjungan lapangan serta lembar waktu kerja individual kepada Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jambi, dan selama ini para pendamping desa sudah disiplin dalam menyampaikan semua laporan tersebut. Saya bisa mengatakan begini karena setiap penyampaian laporan individual tersebut harus melalui verifikasi saya sendiri.

Keberhasilan ataupun kegagalan kinerja suatu organisasi dapat diukur dengan dilakukannya suatu pengukuran dan suatu pelaporan hasil-hasil kerja dari para aparatur, yang dilakukan secara formal. Menurut Rivai (2011:29) laporan hasil pengukuran kinerja mempunyai dua fungsi, yaitu:

- a. Sebagai pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai, proses yang dilakukan, dan sumber daya yang telah dipercaya untuk dikelola;
- b. Sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Bersamaan dengan itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Camat Tanah Tumbuh bapak Ardani, S.STP pada tanggal 12 Januari 2022, yaitu : Iya dek, pendamping desa serta pendamping lokal desa itu membuat laporan kerja setiap bulannya yang nantinya juga akan dikirim ke kecamatan, untuk diketahui oleh camat.

Berikut juga yang disampaikan oleh pendamping desa dengan penulis dalam wawancara pada tanggal 5 Februari 2022 yaitu :

Kita sebagai pendamping desa dan pendamping lokal desa, setiap bulannya wajib mengumpulkan laporan individual dek, ya istilahnya hasil kerja kita selama sebulan gitu, yang diketahui oleh kepala desa. Nanti setelah itu baru dikirim ke camat, tapi hanya sekedar mengetahui saja dan terakhir dikirim ke propinsi dan itu dalam bentuk hardcopy bukan softcopy dek.

Laporan hasil kinerja aparatur sangat bermanfaat untuk aparatur itu sendiri maupun lembaga atau instansi dalam meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik dimasa yang akan

datang, dari laporan hasil kinerja aparatur akan diketahui hasil yang diperoleh oleh para aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya, kinerja dalam suatu instansi pemerintahan merupakan suatu cerminan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi dapat dilakukan melalui penilaian kinerja. Baik itu penilaian kinerja aparatur, maupun penilaian kinerja organisasi. Karena pada hakikatnya kinerja aparatur pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Flipo (1995:28) bahwa “meskipun setiap organisasi berbeda pandangan tentang standar kualitas kerja pegawai, tetapi pada intinya efektifitas dan efisiensi menjadi ukuran yang umum”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi disiplin para pendamping desa dan pendamping lokal desa khususnya di Kecamatan Tanah Tumbuh Desa Koto Jayo dan Desa Tanah Tumbuh sudah tergolong cukup baik dikarenakan setiap bulan para pendamping desa telah rutin menyampaikan laporan individual berupa formulir kunjungan lapangan dan lembar waktu kerja individual.

Promptness (Ketepatan)

Berkaitan dengan dimensi ketepatan yang dimaksudkan disini adalah hal berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang telah direncanakan dan manfaat waktu yang seefisien mungkin. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Camat Tanah Tumbuh Bapak Ardani, S.STP pada tanggal 12 Januari 2022, beliau menuturkan:

Sangat memprihatinkan para pendamping desa selalu datang terlambat dan tidak tepat waktu sehingga dalam pelaksanaan kegiatan juga menjadi tidak tepat waktu, dikarenakan jarak tempat tinggal pendamping ini sangat beragam ada yang jauh dan ada yang dekat, rata-rata pendamping desa bertempat tinggal di Kabupaten Bungo dan jarang ada yang menetap di desa yang didampingi sedangkan lokasi desa yang mereka dampingi jauh dari pusat kota serta ditambah lagi adanya pengunduran diri dari pendamping loka desa, jadi semuanya di handle sementara oleh pendamping desa kecamatan.

Sebagaimana diungkapkan dengan pendapat yang sama oleh Kepala Desa Koto Jayo bapak Said Somad pada tanggal 13 Februari 2022, yaitu:

Masalah yang ditemui dilapangan dalam proses pendampingan terkait pendampingan dalam pembangunan desa, bahwa pendamping desa selalu saja tidak tepat waktu ketika dibutuhkan dan pendamping desa tidak sesuai jadwal pendampingan yang telah ditetapkan, dalam artian ketika ada hal-hal yang bersifat penting untuk dibahas bersama pendamping desa, bahkan perangkat desa yang terlebih dahulu yang menghubungi pendamping, maka kepala desa dan perangkatnya harus bekerja sendiri tanpa harus menunggu yang pada akhirnya pekerjaan tersebut harus diperbaiki dan pekerjaan yang lain menjadi terhambat dan tidak selesai tepat waktu. Hal ini tidak bisa kita salahkan sepenuhnya kepada pendamping desa dan pendamping lokal desa karena itu semua bersifat situasional, terkadang dalam perjalanan para pendamping selalu mengalami masalah seperti motor yang rusak, diterpa hujan dan lain-lain dalam menuju lokasi tugas yang didampingi serta pendamping desa bertempat tinggal jauh dari Desa Koto Jayo yaitu di Muara Bungo jarak tempuh 1 jam jika cuaca juga mendukung.

Dengan di hari yang sama penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa Tanah Tumbuh Bapak Jahari, yaitu :

Kami selaku perangkat desa dari jauh hari berkomunikasi dan membuat janji dengan pedamping desa perihal pedampingan pembangunan desa melalui via phone terkadang memang pedamping desa susah di hubungi dan tidak menelpon balik, hal yang wajar jika pedamping desa tersebut terkadang tidak datang karena kendala dalam perjalanan sehingga kami mengundur waktu sampai bertemu. Kami memaklumi hal tersebut dan mengetahui bahwa pendamping lokal desa telah mengundurkan diri, dimana semua pekerjaan langsung di handle dengan 1 (satu) orang saja. Namun apabila kita sebagai perangkat desa harus menjaga hubungan baik dengan pedamping, dan sejauh ini jikalau ada pengunduran waktu bertemu, pedamping desa pasti akan datang di pertemuan selanjutnya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pendamping Desa Kecamatan yaitu Ananto Pratekno pada tanggal 05 Februari 2022, yaitu :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kementrian Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jambi dengan Nomor Surat: 414.2/SPT/902/DPMD dengan jabatan pendamping desa dan lokasi tugas dimana surat tugas berlaku mulai dari 2 januari 2022 sampai dengan 31 desember 2022. Kalau saya mengacu dengan surat perintah tersebut bahwa surat tugas kami hanya selama satu tahun, artinya dalam waktu kurun satu tahun itu merupakan waktu yang sangat singkat dengan melihat kondisi yang dihadapi desa. Ini juga merupakan salah satu alasan kami dalam menyelesaikan tugas pendampingan didesa. Adapun yang menjadi hambatan yang sering dialami yaitu masalah jarak rumah dengan lokasi, sekitar 1 jam dan terkadang ditengah perjalanan sering saja terjadi hambatan ketika menuju lokasi tugas seperti ban motor bocor, kehujanan ataupun kerusakan lainnya serta perangkat desa yang kurang menerima adanya pendamping desa dan pendamping lokal desa.

Berdasarkan hasil analisis penulis, dengan demikian yang dialami oleh desa dalam proses pendampingan terkait pembangunan desa berdasarkan hasil wawancara diatas yaitu merupakan tidak datang nya pedamping desa dalam pendampingan pembangunan desa bukan dengan faktor di sengaja melainkan jarak tempuh yang lumayan jauh serta adanya kendala cuaca yang menghambat pedamping desa hadir dalam kegiatan pendampingan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Suwardjono (2011:170) mengenai ketepatan waktu (*time liness*) merupakan "Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan" Dilihat dari wawancara dengan kepala desa tanah tumbuh dan desa koto jayo penulis menilai pedamping desa mampu melakukan pekerjaannya dengan cukup baik dan tepat waktu jika tidak adanya kendala dalam perjalanan menuju desa, walaupun pedamping desa melakukan pekerjaan tanpa dengan adanya pendamping lokal desa.

Initiative (Prakarsa)

Inisiatif atau prakarsa yang muncul dari setiap aparaturn pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam organisasi, akan menjadi pendorong untuk menumbuhkan kompetensi dari aparat dan aktivitas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Hal ini belum terwujud pada pendamping desa yang ada di Desa Koto Jayo dan Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh.

Sejalan dengan penuturan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Koto Jayo Bapak Najamuddin pada tanggal 13 Februari 2022, menuturkan:

Kalo untuk inovasi dan inisiatif dari pendamping desa itu agak kurang, pak. Padahal kami mengharapkan ada masukan dari para pendamping desa dalam setiap rapat desa, karena mengingat mereka memang membidangi masalah desa dan mereka juga masih muda-muda, harusnya bisa memberikan inovasi terhadap pembangunan yang ada didesa”.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Sekretaris Desa Koto Jayo Bapak Samsul Bahri, pada tanggal 13 Februari 2022, yaitu:

Pendamping desa ini dek ketika pelaksanaan kegiatan kurang untuk berinisiatif padahal Kami berharap pendamping desa ini mampu berinisiatif dan berinovasi dalam setiap kegiatan yang ada di desa, apalagi kami yang ada didesa ini juga sangat minim dengan pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Tanah Tumbuh kepada bapak Darul Quthni, yaitu :

Kalo masalah inisiatif memang pedamping desa dapat dikatakan masih kurang, karena kami banyak bertanya terkait pelaksanaan pembangunan dan mereka juga seperti kebingungan dalam menjawab pertanyaan kami tersebut, dengan selalu alasan terbatasnya kewenangan pedamping melakukan pendampingan dalam pembangunan desa.

Hal ini dibenarkan oleh Pendamping Desa Kecamatan, Bapak Ananto Pratekno pada tanggal 05 Februari 2022 dengan menyampaikan alasannya yaitu:

Kami menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang telah diberikan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pendamping Desa. Kalo untuk inisiatif, kami tidak bisa memberikan banyak inisiatif maupun inovasi karena wewenang kami terbatas, hanya dalam lingkup pendampingan saja.

Hal ini belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mitchell terkait indikator *Initiative* (Prakarsa) yang mana menurut teori Mitchell inisiatif atau prakarsa yang muncul dari setiap aparatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam organisasi, akan menjadi pendorong untuk menumbuhkan kompetensi dari aparat dan aktivitas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Nugroho (2009:5) bahwa “Inisiatif merupakan sebuah upaya untuk menumbuhkan kompetensi dari masing-masing aparat dalam kaitannya dengan aktivitas tertentu.” Sementara itu, Susanto (2008:5) mengemukakan derajat inisiatif meliputi: derajat tanggung jawab, kebebasan dan independensi dari masing-masing anggota organisasi.

Namun pada kenyataannya di Kecamatan Tanah Tumbuh diukur dari bagaimana model inovasi yang diterapkan, proses inovasi dan manfaat dari inovasi belum ada inisiatif dari para pendamping desa karena terbatasnya wewenang yang mereka miliki dalam pelaksanaan pendampingan di desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

CONCLUSION

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan dan penelitian adalah sebagai berikut: kinerja Tenaga pendamping desa dalam pembangunan desa di Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi maka dapat disimpulkan kinerja pendamping desa belum memenuhi semua indikator, hanya beberapa indikator saja, kualitas kerja (*Quality of Work*) pendamping desa dinilai sudah memenuhi indikator, dikarenakan setiap bulannya pendamping desa diwajibkan menyampaikan laporan individual, formulir kunjungan lapangan, dan lembar waktu kerja individual kepada Satker P3MD Provinsi Jambi. Pendamping desa telah disiplin

menyampaikan laporan individual tersebut setiap bulannya. Kedua, pada indikator Ketepatan (*Promptness*), pendamping desa dinilai cukup memenuhi indikator ketepatan dalam melaksanakan tugasnya, karena dalam pelaksanaan progres kegiatan pembangunan di desa pedampingan desa selalu menghadiri kegiatan pendampingan walaupun terkadang terkendala dengan dengan jarak tempuh dan cuaca. Ketiga, Prakarsa (*Initiative*) Pendamping desa dinilai belum memenuhi indikator, dikarenakan masih kurangnya inisiatif dan inovasi dari pendamping desa dalam melaksanakan pendampingan di desa, dengan alasan terbatasnya kewenangan pendamping desa hanya dalam lingkup pendampingan saja. Keempat, Kemampuan (*Capability*) pendamping desa dinilai belum memenuhi indikator kemampuan. Kemampuan Pendamping desa yang masih terbatas karena dilihat dari riwayat pendidikan dan riwayat berorganisasi serta kurangnya pengembangan kemampuan pendamping desa dikarenakan kurangnya kesadaran pedamping desa untuk mengikuti diklat. Kelima, Komunikasi (*Communication*) pendamping desa dinilai belum memenuhi indikator, karena ada beberapa pendamping desa masih kurang intens dalam berkomunikasi dengan pemerintah desa.

REFERENCES

Book

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beratha, I. N. 1991. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social Science Research: Principles, Methods, And Practices*. USA: Creative Commons Atribusi-BY.
- Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An introduction to theory and methods* (Third Edition). Boston: Allyn and Bacon
- Calderon, Jose F, Expectation C Gonzales. 1993. *Method of Research and Thesis Writing*. Madaluyung City. National Book Store.
- Crano, W. 2002. *Principles and Methods of Social Research*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Gibson, M., 2001. *Pharmaceutical Preformulation and Formulation*. United States of America: 546-550, CRC Press.
- Given, M Lisa. 2008. *The Sage Encyclopedia of qualitative research Methods*. Charles Sturt University, Australia.
- Irianto, J. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya : Insan Cendekia.
- Khotari, C.R. 2004. *Research Methodology Methods and Techniques* (second revised edition). New Delhi: New Age International.
- Korten, D.C, Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Labolo, Muhadam. 2015. *Dinamika Politik & Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Merriam, S.B. 2001. *Dalam Qualitative Research And Case Study Applications In Education*. San Fransisco: Jossey-Bass
- Mitchell and Larson (1987 : 491). *People and organization an interdiction to organizational behavior*. Singapore: MC Grew Hill MC.

- Miles, M.B and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moenir, H.A.S.2008. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, Mohammad, 2014, *Metode Penelitian Praktis : Kuantitatif Dan Kualitatif*, Penerbit : Publica Institute, Jakarta.
- Neuman, W Laurence. 2006. *Social Research Methods*. United States of America : Allyn and Bucon.
- Nugroho, D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Primahendra. R. 2002. *Pedoman Pendampingan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*: Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama..
- Rivai. 2004. *Penilaian Prestasi Kerja Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Ganudra Pustaka Utama.
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2007. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung. Penerbit Bandar Maju.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Journal

- Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 41). European Alliance for Innovation.
- Fitriyanti, N., Rahman, K., Prayuda, R., Zainal, Z., & Rosmayani, R. Implementation of government regulations in the implementation of child protection in Rokan Hilir Regency of Indonesia.
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tentang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 9(2), 167-184.
- Hilman, Lutfi, Cikusin, Yaqub, Abidin, Zainal, Agus. 2019. Efektifitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. *Jurnal. Universitas Islam Malang*.
- Dotulong, Glory P, Citra, Pioh, Novie. Wawurundeng, Welly. 2018. Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3

- Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Rahmi, Elita, Hartati. HM, Pahrudin. 2019. *Jurnal Internasional: Implementing Independent Village with Political Law's Reconstruction of Government Village in Indonesia*.
- Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society's Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(3), 1030-1046.
- Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on 'Point Blank Online'Play. *Jurnal The Messenger*, 11(1), 18-26.
- Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.
- Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1), 49-62.
- Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Good Governance in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci District. *Pelalawan Regency*.
- Susanti, Herna Martien. 2017. Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Jurnal: Universitas Negeri Semarang*.
- Venus, Antar. Siregar, Adiatma, 2016. *Jurnal Internasional : Pendamping desa (village mentor) as a community manager: a case study of the role of pendamping desa in empowering community and local institution through communication approach in the province of Riau, Indonesia*.

Sumber Internet

<https://www.gatra.com/news-443933-ekonomi-di-bungo-30-dusun-masih-tertinggal.html>

<https://ditjenpdp.kemendes.go.id/view/detil/241/hasil-pemutakhiran-indeks-desa-membangun-idm-tahun-2021-capai-3269-desa-mandiri>

<https://www.bpkp.go.id/berita/read/19423/205/Sukseskan-Padat-Karya-Tunai-Mendes-PDPT-Kerahkan-39.000-Pendamping-Desa.bpkp>